



► PENATAAN WILAYAH

PKL Malioboro Butuh Pengawasan Khusus

DANUREJAN—Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jogja pengawasan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, menyebut penataan kawasan menyangkut PKL butuh pengawasan khusus.

*Yosef Leon
yosef@harianjogja.com*

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan terhadap kebijakan pemerintah mengenai

► Ada sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Jogja dalam operasional PKL di Teras Malioboro.

► Pemkot Jogja diminta menugaskan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM mengelola operasional di Teras Malioboro II.

pemindahan PKL Malioboro ke Teras Malioboro I dan II, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dari hasil pembahasan, pansus mengeluarkan sejumlah

catatan dan rekomendasi agar segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Jogja.

Ketua Pansus DPRD Kota Jogja Pengawasan Relokasi PKL Malioboro, Antonius Fokki Ardianto menyebut, proses relokasi PKL Malioboro ke tempat baru membutuhkan pengawasan yang khusus agar kebijakan itu dapat berlaku transparan dan mengakomodasi semua pihak. Pembentukan pansus yang diisi oleh sejumlah partai di DPRD Kota Jogja itu pun telah menyelesaikan pembahasan terhadap kebijakan relokasi itu dan diharapkan bisa jadi perhatian Pemkot Jogja.

"Sejak proses relokasi PKL berlangsung, kami sudah mulai mengumpulkan data baik itu dengan menerima audiensi dengan PKL, Pemda DIY maupun kunjungan langsung ke lapangan," ujarnya, Senin (18/7).

Fokki menyebut dalam catatannya ada sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat dalam operasional PKL di Teras Malioboro. Beberapa di antaranya yakni titik di kawasan Teras Malioboro dua yang harusnya difungsikan sebagai jalur pengunjung malah dibuat untuk berjualan, sirkulasi udara di dapur Teras Malioboro dua

yang kurang optimal, serta lapak PKL kuliner yang terlalu dekat dengan PKL fesyen sehingga asap yang ditimbulkan dari aktivitas memasak cukup mengganggu.

Melihat catatan tersebut ia meminta Pemkot Jogja untuk menugaskan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM untuk mengelola operasional di Teras Malioboro II.

Masukan Penting

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi mengatakan Pemkot mengapresiasi catatan dan rekomendasi yang dilayangkan oleh Pansus berkaitan dengan relokasi

PKL Malioboro. Menurutnya, hal itu merupakan masukan yang penting bagi pemerintah untuk membuat kawasan Teras Malioboro kian nyaman bagi PKL dan juga pengunjung.

Hanya saja, Sumadi menuturkan bahwa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini tentu membuat fokus pemerintah terbagi-bagi.

"Kami kan juga sudah berikan intensif kepada PKL semisal sewa lapak, air dan lain sebagainya, tunggu lah jangan tergesa-gesa. Ini kan menyangkut orang banyak," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005